

BAB 5

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

1.1 Simpulan

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor memberikan peran yang besar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Wilayah Surabaya Utara. Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor selalu melampaui target yang telah ditetapkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa realisasi Pajak Kendaraan Bermotor tergolong sangat efektif.
2. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah tergolong baik, dimana nilai kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 49,52%.
3. Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Wilayah Surabaya Utara pada Tahun 2016 tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Namun, rata-rata realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Wilayah Surabaya Utara pada Tahun 2013-Tahun 2017 tergolong sangat efektif.
4. Nilai kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor wilayah Surabaya Utara dari Tahun 2013 hingga Tahun 2017 sangat fluktuatif. Tetapi, sejak Tahun 2013-Tahun 2017 nilai kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor tergolong baik dengan nilai 40,13% terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.2 Keterbatasan

1. Masalah survei pengumpulan data yang terbatas, sehingga tidak mendapatkan data di seluruh bagian Kota Surabaya. Sehingga, dalam penelitian ini mengambil satu bagian di Wilayah Surabaya Utara. Keterbatasan waktu wawancara dengan pihak yang memiliki pengetahuan akan sumber data yang dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan pihak yang bersangkutan memiliki waktu yang terbatas.
2. Penelitian ini tidak memperhitungkan tingkat efisiensi. Artinya bahwa penelitian ini tidak membandingkan realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dengan biaya yang harus ditanggung dalam meningkatkan penerimaan. Hal tersebut dikarenakan biaya yang ditanggung bersifat tidak dapat diprediksi, sehingga jika diperbandingkan dengan realisasi penerimaan maka hasil yang diperoleh akan tidak akurat.

1.3 Saran

Demi peningkatan penerimaan daerah wilayah Surabaya Utara, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya supaya dapat melakukan penelitian secara menyeluruh di Kota Surabaya untuk lebih mengetahui efektivitas dan kontribusi secara menyeluruh di Kota Surabaya.
2. Bagi peneliti selanjutnya supaya dapat melakukan penelitian secara lebih akurat dalam memperoleh data dan lebih mendalam

dalam pembahasannya dengan memperhitungkan realisasi biaya yang telah dikeluarkan dalam mencapai realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah dimasing-masing sektornya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rajagrafindo
- Anggota IKAPI. 2017. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bandung: Fokus Media.
- Ardiyos. 2014. Kamus Akuntansi Publik. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2014, Salinan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (https://www.bappenas.go.id/files/6014/1505/8425/Pedoman_RPJMN_2015-2019-Cetak.pdf, diunduh 18 Juli 2017)
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya. 2014. Kota Surabaya Dalam Angka 2014. Badan Pusat Statistik: Surabaya.
- , 2015. Kota Surabaya Dalam Angka 2015. CV. Murni Sari Printed: Surabaya.
- , 2016. Kota Surabaya Dalam Angka 2016. Badan Pusat Statistik: Surabaya
- , 2017. Kota Surabaya Dalam Angka 2017. Badan Pusat Statistik: Surabaya.
- Depkeu.go.id. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf , diunduh 10 Februari 2017)

- , 2010. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (<http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71.pdf>, diunduh 7 Maret 2017).
- Dewan Perwakilan Rakyat. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. (http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_16.pdf, diunduh 10 Februari 2017).
- Erlina, R., O. S., & Rasdianto. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I. 2016. Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Lainnya. Semarang: Yoga Pratama
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. 2017. Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat
- Hasannudin, & Wokas, H. 2014. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara, Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial, Vol. VII, No. 2
- Hery. 2015. Pengantar Akuntansi: Comprehensive Edition. Jakarta: PT. Grasindo

- Jaka, W. 2013. Definisi Pembangunan Daerah. (<http://wiarajp.blogspot.co.id/2013/10/definisi-pembangunan-daerah.html>, diunduh 14 Maret 2017)
- Juliantika, & Raharjo, B. T. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi Tahun 2010-2014. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Krisnadwipayana*, Vol. 3, No. 2, 2016
- Karina, N., & Budiarmo, N. 2016. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo. *EMBA*, 715-722.
- Kemlu.go.id. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. (<http://pih.kemlu.go.id/files/UU0232014.pdf>, diunduh 14 Maret 2017).
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: C.V. Andi
- , 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi.
- Novia, D., 2014, Kontribusi Retribusi Parkir Tepi Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda Tahun 2010-2012, *eJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 3: 3070-3079.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. (<http://p2t.jatimprov.go.id/uploads/KUMPULAN%20PERATURAN%20PERIZINAN%20PER%20SEKTOR%202014/PENGAIRAN/Perda-No.9-Thn-2010-ttg-Pajak-Daerah.pdf>, diunduh 6 September 2017).
- Priantara, D. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Rompis, N. E, Ilat, V., & Wangkar, A. 2015. Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Studi Kasus Pada Samsat Airmadidi). Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 15, No. 03.
- Rusjdi, M. 2007. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Edisi Keempat. Jakarta: PT. Indeks
- Siahaan, M. P. 2013. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simanjuntak, T. H., & I. Muklis, 2012, Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Soemarso. 2012. Perpajakan: Pendekatan Komprehensif. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta
- Sumarsan, T., 2013, Perpajakan Indonesia Edisi 3, Jakarta: PT. Indeks.